



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

6.1 INFORMASI REKENING GIRO YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dikelola oleh SKPD.

6.2 INFORMASI DEPOSITO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Pemerintah Kabupaten Bengkulu tidak menempatkan Deposito pada Bank-bank Pemerintah yang berada di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018.

6.3 INFORMASI STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu (entitas akuntansi) selama periode pelaporan yakni Tahun 2018 terdiri dari :

- ☞ Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ☞ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- ☞ Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup 3 Asisten;
- ☞ Sekretariat DPRD;
- ☞ Inspektorat;
- ☞ Badan yang mencakup 7 badan;
- ☞ Dinas yang mencakup 22 dinas;
- ☞ Kantor yang mencakup 1 kantor;
- ☞ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mencakup 2 RSUD yakni RSUD Kabupaten Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau;
- ☞ Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan;
- ☞ PPKD

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No.3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Didalam Peraturan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

tersebut ditetapkan adanya perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

No	OPD
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2	Sekretariat Daerah
3	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Sekretariat DPRD
5	PPKD
6	Badan Kepegawaian , pendidikan dan pelatihan
7	Dinas Kesehatan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Badan Pendapatan daerah
12	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Dinas Pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
18	Dinas perdagangan dan perindustrian
19	Dinas Lingkungan Hidup
20	Badan Penelitian dan Pengembangan
21	Dinas Pendidikan
22	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Dinas Pertanian
24	Dinas Perhubungan
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Inspektorat
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
30	Dinas Ketahanan Pangan
31	Dinas Sosial
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
34	Rumah Sakit Umum Daerah Kec. Mandau
35	Kecamatan Bengkalis
36	Kecamatan Bantan
37	Kecamatan Bukit Batu
38	Kecamatan Siak Kecil
39	Kecamatan Mandau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

40	Kecamatan Pinggir
41	Kecamatan Rupal
42	Kecamatan Rupal Utara
43	Dinas Pemadam Kebakaran
44	Dinas Komunikasi, informatika dan statistik
45	Dinas pengendalian penduduk dan KB
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
47	Kecamatan Bandar Laksamana
48	Kecamatan Bathin Solapan
49	Kecamatan Talang Muandau

6.4 Informasi Lainnya

- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas PUPR untuk 14 paket pekerjaan dengan total nilai Rp. 9.554.460.193,53. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2020 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas Pendidikan untuk 1 paket pekerjaan dengan nilai Rp52.855.637,73. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2020 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 paket pekerjaan dengan total nilai Rp. 1.1507.570.609,95. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2020 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas Perhubungan untuk 3 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.998.514.000,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2020 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas Kesehatan untuk 8 paket pekerjaan dengan total nilai Rp. 2.721.126.808,92. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2020 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.

6.5 Pandemi Covid-19

Dengan adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 menimbulkan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis antara lain:

- a. Tingkat ketertagihan piutang Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kendala perekonomian yang mengalami hambatan akibat adanya penerapan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPBB) pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019.

- b. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam melunasi pembayaran kewajiban jangka pendek kepada pihak ketiga mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan anggaran tahun 2020 sebagai dampak penanganan pandemi Covid 19. Sementara itu, dari sisi pendapatan, penerimaan pendapatan Kabupaten Bengkulu berpotensi mengalami penurunan sebagai akibat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi umum oleh pemerintah pusat dengan besaran berkisar Rp.700.516.322.000,- (Tujuh ratus milyar lima ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah berpotensi menurun karena banyak usaha mengalami kerugian.
- c. Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp.1.155.218.870.485, 54 atau 30.69 % dari APBD TA 2020 sebesar Rp. 3.524.252.306.344,91 Pergeseran tersebut untuk memenuhi program penanganan krisis adanya pandemi Covid 19 sebesar Rp182.732.034.563,00 antara lain:

Bidang	OPD	Program/kegiatan	Jumlah Dana
Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Bengkulu, RSUD Kecamatan Mandau	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Fisik Penugasan)	475.602.020,00
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (COVID-19) (DAK Non Fisik)	162.000.000,00
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DID)	8.054.055.500,00
		Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Covid-19 (DID)	449.810.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DID)	1.278.500.000,00
		Pencegahan dan Penangan COVID-19 (DID)	21.340.370.500,00
		Santunan Kematian Petugas Medis	3.000.000.000,00
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Fisik)	5.869.732.020,00
		Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	13.380.359.573,00
		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Siaga Covid-19)	6.780.932.600,00
		Penyediaan jasa pelayanan	4.035.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

		kesehatan rumah sakit (Siaga Covid-19)	
		Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (Dapur, Ruang pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	649.790.000,00
		Penyediaan makan dan minum pegawai Rumah Sakit Kab Bengkalis (Siaga Covid 19)	200.000.000,00
		Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	440.418.600,00
		Penambahan Fasilitas Rumah Sakit Siaga Covid 19	997.225.000,00
		Penyediaan Makan dan minum petugas Rumah Sakit Kec. Mandau dalam Penanganan COVID-19	67.500.000,00
		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.690.500.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Siaga COVID-19)	3.465.000.000,00
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Siaga Covid-19)	912.000.000,00
		Penanggulangan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19)	11.491.061.250,00
		Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Asal Kabupaten Bengkalis dari Malaysia	154.490.000,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Dinas Perhubungan	432.960.000,00
		Pembangunan Ruang Thermal Scanner Pelabuhan BSL	50.926.000,00
		Pembangunan Kamar Disinfektan pelabuhan BSL dan BSSR	165.000.000,00
		Perencanaan Pembangunan Ruang Thermal Scanner Pelabuhan BSSR	20.000.000,00
		Pengawasan Pembangunan Ruang Thermal Scanner Pelabuhan BSSR	15.000.000,00
		Biaya Perlengkapan Posko	328.860.000,00
		Honorarium Tim COVID-19	842.140.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	349.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan dalam menyikapi wabah Covid 19	100.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Jasa Kebersihan untuk Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	637.450.000,00
		Penyediaan Kebutuhan Dasar dalam rangka Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bengkulu	1.573.644.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Rangka Penanganan COVID-19	276.850.000,00
Bidang Ekonomi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaksanaan Pasar Murah Dalam Rangka Penanganan COVID-19	28.767.507.500,00
Bidang Sosial	Dinas Sosial	Kebutuhan Makanan Pokok Masyarakat yang terdampak Covid-19 berupa Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	62.378.150.000,00
Total			182.732.034.563,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kemudian, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanah peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 (unaudited) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu harus menyinergikan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset.

Prioritas pertama yang harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping pembenahan sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya yang ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai hal perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Khusus untuk pengelolaan barang milik daerah (aset), Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengelolaan piutang di OPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada OPD yang memiliki data piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun di tingkat OPD, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Bengkalis, Juni 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

H. BUSTAMI, HY, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640907 198603 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)
